

ABSTRAK

Agus Ariani. 2020. *Analisis Dampak Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Omset Pedagang Kantong Plastik di Pasar Lama Kota Banjarmasin*, skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing (I): Dr. Mahmud Yusuf, M. Si. Pembimbing (II): Erissa Nilasari, S.P., M.

Kata kunci: Dampak, Kantong Plastik, Omset Pedagang, Pasar Lama

Memasuki masa globalisasi banyak permasalahan yang diakibatkan oleh penimbunan sampah yang berada di pembuangan. Dalam satu waktu komposisi sampah plastik meningkat 5%, timbunan sampah plastik meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik serta dampaknya terhadap omset penjualan pedagang kantong plastik di Pasar Lama Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya berada di Pasar Lama Kota Banjarmasin. subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kantong plastik di Pasar Lama kota Banjarmasin. Objek penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh para pedagang kantong plastik dengan diterapkannya perda tentang pengurangan kantong plastik di Pasar Lama Banjarmasin, jumlah informannya adalah 9 orang pedagang kantong plastik yang berjualan di Pasar Lama. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif, maksudnya peneliti mengkaji secara mendalam terhadap pembahasan dengan literatur yang terkait berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan, bahwa penerapan Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik mendapat berbagai respon pedagang kantong plastik yang berbeda ada respon positif (setuju) sebanyak 3 orang dan respon negatif,(tidak setuju) sebanyak 6 orang. Adapun tentang omset pedagang tentu saja menurunnya pengasilan yang mereka dapatkan setelah diberlakukannya pengurangan kantong plastik tersebut oleh pemerintah.